

SEKURITISASI HAMAS DALAM KEBIJAKAN ISRAEL PASCA SERANGAN 7 OKTOBER 2023

Nur Aidini

UIN Sunan Ampel Surabaya

nuraidini226@gmail.com

Nur Luthfi Hidayatullah

UIN Sunan Ampel Surabaya

nur.luthfi.hidayatullah@uinsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan sekuritisasi Pemerintah Israel pasca serangan 7 Oktober 2023 atau *Taufan Al Aqsa* oleh Hamas. Penulis berargumen bahwa Pemerintah Israel mengkonstruksi serangan 7 Oktober 2023 sebagai serangan terorisme terhadap masyarakat Israel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data sekunder melalui dokumentasi, dan menganalisis data berdasarkan teori sekuritisasi Buzan, Wæver, dan de Wilde. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Israel sebagai aktor sekuritisasi mengkonstruksi isu terorisme yang dianggap menjadi ancaman bagi masyarakat Israel sebagai *referent object*. Kebijakan sekuritisasi terhadap hamas dilakukan melalui *speech act* untuk mendapatkan dukungan dari audiens guna menjustifikasi intervensi darat Israel ke Gaza.

Kata Kunci: Sekuritisasi, Israel, Hamas, Terorisme, Gaza

Abstract

This research aims to describe Israel's securitization policy after Hamas' October 7, 2023 attack or the Operation Al Aqsa. The authors argue that Israel securitized the October 7, 2023 attack as an act of terrorism towards Israeli society. This research utilizes descriptive qualitative method, with secondary data sources from documentation, and data analysis using Buzan, Wæver & de Wilde's securitization theory. The results of this research show that the Israeli Government becomes a securitizing actor by constructing the issue of terrorism towards Israeli society as a referent object. Israel's securitization policy towards Hamas was done through a speech act in order to gain support from the audience to justify Israel's land intervention in Gaza.

Keywords: Securitization, Israel, Hamas, Terrorism, Gaza

Article History: Received 18 October 2024, Revised: 30 November

2024, Accepted: 05 December 2024, Available online 01 January 2025

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan sekuritisasi Pemerintah Israel terhadap Hamas pasca serangan 7 Oktober 2023. Penulis berargumen bahwa Pemerintah Israel mengkonstruksi serangan 7 Oktober 2023 sebagai serangan terorisme yang dilakukan oleh Hamas terhadap masyarakat Israel. Serangan militer yang dilakukan pasukan Hamas mengakibatkan 1.200 warga tewas serta 2.400 orang terluka menurut laporan berita Amnesty Internasional¹. Para korban serangan tersebut didominasi oleh masyarakat sipil. Serangan tersebut juga dilancarkan bertepatan dengan perayaan festival musik yang bertepatan dengan hari penting dalam agama Yahudi. Sehingga, serangan tersebut mendapatkan respon kebijakan sekuritisasi oleh Pemerintah Israel yang dianggap sebagai sebuah serangan terorisme oleh Hamas, yang kemudian digunakan oleh Pemerintah Israel untuk melegitimasi tindakan luar biasa (*extraordinary measures*). Pasca serangan 7 Oktober 2023, Israel melakukan serangan balasan yaitu intervensi darat ke Gaza sebagai tindakan luar biasa atas isu yang mengancam keamanan nasionalnya.

Serangan 7 Oktober 2023 oleh kelompok Hamas dilakukan dengan tujuan untuk mengambil hak-hak mereka dari Israel. Serangan yang dilakukan kelompok Hamas tersebut dilakukan untuk memperjuangkan hak mereka di tanah Palestina. Sekitar dua juta masyarakat Palestina mengungsi ke Jalur Gaza setelah perang negara-negara Arab dengan Israel tahun 1948 dan 1967. Sehingga, masyarakat Palestina di Jalur Gaza merupakan *Internally Displaced Persons* (IDP) yang sedang berusaha menentukan nasib mereka di tanah air mereka sendiri. Hal ini sebagai respon alami terhadap apa yang mereka alami yaitu dipindah secara paksa dan menjadi pengungsi di negara mereka sendiri. Di sisi lain, Israel memberi label terorisme bagi kelompok Hamas, yang melakukan retaliasi terhadap Israel yang menduduki tanah Palestina. Dalam konteks ini, kebijakan sekuritisasi

¹ Amnesty International, 'Israel: Palestinian armed groups must be held accountable for deliberate civilian killings, abductions and indiscriminate attacks' (2023), <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/israel-palestinian-armed-groups-must-be-held-accountable-for-deliberate-civilian-killings-abductions-and-indiscriminate-attacks/>.

Pemerintah Israel terhadap Hamas menjadi fokus penting karena digunakan sebagai justifikasi intervensinya ke Gaza.

Sebelum terjadinya serangan 7 Oktober 2023, Israel pernah menuduh Hamas sebagai kelompok teroris yang menguasai Gaza pada tahun 2005². Sekuritisasi isu terorisme yang dilakukan sebelum insiden 7 Oktober 2023, dilakukan Israel dengan serangan udara dan serangan darat terbatas seperti pada upaya penyeragaman jaringan terowongan Hamas³. Sedangkan pasca insiden 7 Oktober 2023, Israel melakukan serangan darat ke Gaza, mulai dari Gaza Utara, Kota Gaza, Khan Younis, hingga Rafah. Hal ini ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur-infrastruktur militer yang diduga milik Hamas yang berada di jalur Gaza, Palestina⁴. Penggambaran Hamas sebagai terorisme sejak dulu, sebelum serangan 7 Oktober 2023, menjadi alasan Israel untuk menumpas Hamas yang mengancam keamanan masyarakat Israel dan stabilitas keamanan kawasan.

Serangan 7 Oktober 2023 dilakukan Hamas sebagai bagian dari konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina yang sudah terjadi hampir satu abad yang lalu, ketika Inggris memberikan janji kemerdekaan untuk mendirikan sebuah negara bagi orang-orang Yahudi di Palestina berdasarkan Deklarasi Balfour. Wilayah Palestina tersebut diambil alih oleh Inggris dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 1917. Migrasi kaum Yahudi secara besar-besaran ke Palestina mengakibatkan populasi Yahudi meningkat pesat. Perubahan demografi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat Palestina. Meningkatnya ketegangan tersebut menimbulkan pemberontakan oleh rakyat Palestina terhadap kaum Yahudi yang menempati wilayahnya. Di sisi lain, organisasi Zionis terus melakukan penyerangan dengan senjata dan kampanye untuk mendapatkan wilayah Palestina. Lebih dari 750.000 warga Palestina diusir dari rumah mereka oleh para Zionis dalam peristiwa penting yang dikenal dengan

² Michael Xiang Li, 'Defining the Other – Israeli Securitization of the Palestinian Population in the West Bank and Gaza since 2009', (2018), <http://hdl.handle.net/10393/38133>.

³ Ibid.

⁴ Britannica, 'Israel-Hamas War – Explanation, Summary, Casualties, & Map' (2024), <https://www.britannica.com/event/Israel-Hamas-War>.

Nakba atau sebuah malapetaka sebelum pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Israel kemudian mengambil alih wilayah Timur Yerusalem yang merupakan kota suci umat Yahudi dan Islam⁵. Hingga saat ini, konflik antara Israel dan Palestina belum mencapai kesepakatan damai.

Buzan, Wæver dan de Wilde dalam bukunya “Security: A New Framework for Analysis” menjelaskan bahwa sekuritisasi merupakan sebuah proses dimana suatu isu dikonstruksi sebagai ancaman yang eksistensial. Proses ini dianggap berhasil ketika target audiens menerima kerangka ini serta mendukung langkah-langkah untuk mengatasinya dan mengalihkan isu politik normal ke dalam mode darurat. Proses sekuritisasi melibatkan seorang aktor sekuritisasi yang bertujuan untuk meyakinkan target audiens bahwa isu tersebut menimbulkan ancaman yang eksistensial terhadap objek rujukan⁶.

Pada penelitian ini, penulis menemukan berbagai narasi yang dibangun oleh Pemerintah Israel untuk meyakinkan seluruh dunia bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 adalah serangan teror yang sangat mengerikan, sehingga serangan balasnya merupakan suatu tindakan yang benar dalam rangka menjaga keamanan nasional Israel. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penulis berupaya memaparkan bagaimana kebijakan sekuritisasi Israel dalam rangka menjustifikasi intervensi darat ke Gaza pasca insiden 7 Oktober 2023. Penulis memaparkan bagaimana tindak tutur para aktor sekuritisasi Israel menggambarkan serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas tersebut menjadi suatu ancaman yang serius untuk meyakinkan audiens.

⁵ Mohammed Haddad Chughtai Alia, ‘A brief history of Israel-Palestine conflict in 10 maps’, (Al Jazeera, 2023), <https://www.aljazeera.com/news/2023/11/27/palestine-and-israel-brief-history-maps-and-charts>.

⁶ Barry Buzan, Ole Wæver & Jaap de Wilde, ‘Security a New Framework Analysis’. Lynne Rienner Publisher, (1998), <https://library.lol/main/91A33C7D1B88D6199BA8E63AFBC19860>.

Teori Sekuritisasi

Teori sekuritisasi dikembangkan dalam rangka mendefinisikan ulang konsep keamanan secara luas, mencakup aspek politik, sosial ekonomi, dan lingkungan⁷. Sekuritisasi menjadi suatu bentuk politisasi yang lebih ekstrim, yang mana suatu isu dikonstruksi sebagai ancaman yang eksistensial. Teori sekuritisasi identik dengan teori konstruktivisme yang berpacu pada identitas kolektif, yaitu isu keamanan berasal dari konstruksi masyarakat sehingga bersifat subjektif. Teori sekuritisasi menjadi salah satu teori penting dalam menjawab masalah keamanan dalam dunia modern.

Teori sekuritisasi menempatkan isu publik dalam tiga spektrum, yaitu *non politicized*, *politicized*, dan *securitized*. Pada spektrum *non politicized*, isu dianggap tidak penting oleh negara serta tidak menjadi topik perdebatan publik. Pada tahap ini pemerintah tidak perlu memperhatikan isu tersebut sehingga tidak terdapat kebijakan maupun alokasi sumber daya. Pada spektrum *politicized*, isu mulai dianggap penting sehingga menjadi bagian dari kebijakan publik serta memerlukan kebijakan pemerintah dan alokasi sumber daya. Pada spektrum *securitized*, isu tersebut telah dianggap menjadi ancaman yang eksistensial yang memerlukan tindakan darurat di luar prosedur politik. Pada tahap ini isu dianggap sangat mendesak sehingga tindakan ekstrim dibenarkan⁸.

Terdapat beberapa komponen penting dalam proses sekuritisasi, yaitu *securitizing actors*, *speech act*, *existential threat*, dan *referent objects*. *Securitizing actors* merupakan aktor sekuritisasi yang mengkonstruksi suatu isu menjadi suatu ancaman keamanan yang eksistensial melalui pernyataan lisan maupun tindakan. *Speech act* merupakan pernyataan atau tindakan aktor sekuritisasi dalam mengidentifikasi atau mengkonstruksi suatu isu menjadi suatu ancaman keamanan. *Existential threat* merupakan anggapan suatu isu sebagai ancaman nyata bagi *referent objects*. Sedangkan

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

referent objects merupakan suatu objek yang dianggap terancam secara nyata dan membenarkan klaim untuk bertahan hidup dan membela diri⁹.

Analisis sekuritisasi tidak bersifat objektif dalam hal keberadaan ancaman yang nyata, melainkan secara subjektif berdasarkan konstruksi aktor yang diterima oleh audiens dan dianggap sebagai ancaman bersama, sehingga memerlukan respon tertentu. Proses sekuritisasi terjadi ketika komponen langkah sekuritisasi terpenuhi dan audiens menerima serta membenarkan tindakan darurat yang melampaui aturan. Teori sekuritisasi tepat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan sekuritisasi isu terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Israel pasca serangan 7 Oktober 2023 atau *Taufan Al Aqsa* oleh Hamas. Dengan menganalisis komponen-komponen penting dari sekuritisasi, seperti aktor sekuritisasi, ancaman eksistensial, objek referensi, dan *speech act*, untuk menggambarkan ancaman terorisme sebagai ancaman yang nyata kepada audiens sehingga Pemerintah Israel dapat membenarkan intervensi militer ke Gaza.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui dan memahami fenomena masalah atau konflik sosial yang sedang berlangsung. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti objek secara alamiah. Hasil dari penelitian kualitatif akan lebih menekankan pada makna daripada generalisasi¹⁰. Jenis penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana proses, tahapan, dan komponen penting dalam proses sekuritisasi. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggambarkan fenomena dalam proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Israel untuk menggambarkan isu terorisme pasca serangan 7 Oktober 2023 atau *Taufan Al Aqsa* oleh Hamas, sehingga mendukung intervensi ke Gaza.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi untuk mengumpulkan

⁹ Ibid.

¹⁰ Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D', Bandung: *Alfabeta*, (2015).

data berupa buku, artikel jurnal dan situs berita yang digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan berdasarkan topik penelitian, yaitu kebijakan sekuritisasi Pemerintah Israel setelah *Taufan Al Aqsa*.

HASIL DAN DISKUSI

Pergeseran Isu Hamas dari *Non politicized* ke *Securitized*

Kelompok Hamas atau *The Harakat al Muqawama al-Islamiya (Islamic Resistance Movement)* merupakan gerakan perlawanan Islam yang terbentuk pada akhir tahun 1987. Cikal bakal kelompok ini adalah pergerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan di Mesir pada tahun 1928. Gerakan Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan Islam utama pada saat itu menjadi induk dari seluruh gerakan yang membentuk Islam di Timur Tengah, kecuali Iran. Ikhwanul Muslimin mendirikan cabangnya di hampir seluruh negara Arab. Pada tahun 1946 cabang di Palestina didirikan tepatnya di ibu kota Palestina, Yerusalem¹¹. Pergerakan ini menganut prinsip bahwa Islam merupakan jawaban dari setiap masalah di seluruh sektor kehidupan era modern.

Gerakan Ikhwanul Muslimin Gaza pada mulanya bersifat damai dan tidak konfrontatif, yaitu pergerakannya dipusatkan pada rehabilitasi ekonomi dan sosial bagi para pengungsi Gaza. Tujuan gerakan Ikhwanul Muslimin adalah untuk membangun negara-negara Islam yang kemudian akan bersatu menjadi satu kesatuan negara Muslim. Anggotanya menduduki jabatan penting di pemerintahan yang tersebar di berbagai negara, diantaranya Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Maroko, Mesir, Sudan, Yaman dan Yordania. Anggotanya cenderung mengikuti agenda dan kepentingan nasional masing-masing, meskipun berasal dari latar belakang organisasi yang sama¹².

¹¹ Tareq Baconi, 'Hamas Contained: The Rise and Pacification of Palestinian Resistance', *Stanford Studies in Middle Eastern and Islamic Societies and Cultures*, Redwood City: *Stanford University Press*, (2018).

¹² Khaled Hroub, 'Hamas: A Beginner's Guide', London: *Pluto Press*, (2006).

Ikhwanul Muslimin meyakini bahwa agama Islam merupakan fondasi dalam mengatur segala aspek kehidupan, termasuk aspek politik didalamnya. Dalam menyebarkan paham-paham ajarannya, Ikhwanul Muslimin menggunakan jalan damai tanpa melibatkan politik dan kekerasan. Namun pada beberapa kelompok, kekerasan digunakan dalam mencapai tujuan keagamaan maupun politik, seperti ketika menghadapi pemerintah represif di Mesir dan Suriah. Memasuki pertengahan 1980-an, Ikhwanul Muslimin mengulangi komitmennya untuk menggunakan cara-cara damai dalam gerakannya. Ikhwanul Muslimin sebagai cikal bakal dari kelompok Hamas, yang awalnya tidak dianggap sebagai suatu ancaman keamanan oleh Pemerintah Israel, melainkan hanya dianggap sebagai suatu gerakan sosial keagamaan yang membantu masyarakat Palestina. Hal itu menjadikan isu Hamas dalam gerakan Ikhwanul Muslimin masih dalam tahap *non political issue*.

Kemudian, Ikhwanul Muslimin mulai menghimpun kekuatan dan membangun pondasi di kota-kota besar di Palestina pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Pada Desember 1987, terjadi Intifada atau pemberontakan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel di Gaza dan kemudian berlanjut ke Tepi Barat. Intifada ini menjadi awal pembentukan kelompok Hamas oleh kader Ikhwanul Muslimin dan faksi-faksi keagamaan *the Palestinian Liberation Organization* (PLO). Penerbitan piagam yang menyuarakan jihad melawan Israel merubah tujuan awal pembentukan Hamas sebagai wadah perlawanan damai masyarakat Gaza¹³. Nilai-nilai dasar Ikhwanul Muslimin memberikan keyakinan bahwa tanah Palestina merupakan tanah air umat Islam yang direbut oleh Israel.

Cabang Ikhwanul Muslimin Palestina yang berevolusi menjadi Hamas pada akhir tahun 1980-an mengubah arah gerakan Ikhwanul Muslimin di Palestina. Gerakan Ikhwanul Muslimin sebelumnya menjadi organisasi tempat para pemuda berkumpul untuk belajar kitab suci, menjalankan kehidupan yang berbudi luhur, serta membangun dan melindungi tanah air mereka. Pergeseran Arah gerakan Ikhwanul Muslimin menjadi gerakan politik dan militer, menjadikan isu Hamas mulai menjadi topik perdebatan

¹³ DW, 'Kronologi Konflik antara Hamas dan Israel', 2023, <https://www.dw.com/id/sejarah-konflik-hamas-dan-israel/a-67079531>.

publik. Perubahan inilah yang mengubah pandangan pihak eksternal, termasuk Israel terhadap Hamas. Sehingga, keberadaan Hamas menjadi isu yang dipolitisir (*politicized*).

Pasca intifada pertama, gerakan Hamas mulai melakukan serangan, seperti menggunakan bom bunuh diri yang pernah dilakukan di Tel Aviv dan Yerusalem pada tahun 1997. Peristiwa tersebut memakan korban jiwa, baik dari pihak Palestina maupun pihak Israel. Serangan fisik yang semakin gencar tersebut memperlihatkan karakteristik kelompok teroris seperti yang diklaim Pemerintah Israel dan negara-negara Barat. Pada tahap berikutnya, isu Hamas mulai dianggap sebagai ancaman keamanan (*securitized*) karena banyak memakan korban warga sipil dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat.

Kebijakan Sekuritisasi Isu Terorisme Hamas Sebelum dan Sesudah *Taufan Al Aqsa*

Sebelum insiden serangan 7 Oktober 2023 atau *Taufan Al Aqsa* oleh Hamas, Israel telah mengklaim kelompok Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan Palestina lainnya sebagai kelompok teroris. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Benjamin Netanyahu yang mengungkapkan keraguannya terhadap pembentukan entitas Palestina karena PLO menolak segala upaya damai yang ditawarkan Israel.

“...they used it to launch a war of extermination against Israel. Now suppose we followed this suggestion, suppose we just walked out which is what they would like. They'd like us to get out so they can get in to continue, as Arafat refuses to disengage from this program to continue a war of extermination against us. So I think for two reasons, the fact that they're terrorists and the fact that they seek our destruction...”¹⁴

Israel menganggap Hamas dan organisasi- organisasi perlawanan Palestina lainnya sebagai organisasi terlarang dan mengancam negaranya sejak Intifada pertama.

¹⁴ Face the Nation, 'Throwback Thursday: Netanyahu Discusses the Peace Process in 1988', 2015, <https://www.youtube.com/watch?v=v0K3jtCW5fY>.

Langkah sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Israel sebelum *Taufan Al Aqsa* dilakukan dengan tujuan untuk melancarkan serangan ke Gaza dengan alasan keamanan. Hal itu dimulai ketika Hamas mengambil alih Gaza pada tahun 2007. Saat itu, Israel mulai melakukan serangan-serangan udara dan memblokade Gaza. Hal ini berlanjut dengan serangan udara pada tahun-tahun berikutnya ke Gaza dengan alasan keamanan nasional Israel¹⁵.

Sedangkan pasca serangan *Taufan Al Aqsa*, kebijakan sekuritisasi dilakukan dengan tujuan menjustifikasi intervensi darat Israel ke Gaza, untuk menumpas Hamas sebagai balas dendam atas serangan 7 Oktober 2023. Israel berupaya mengembalikan posisi *deterrence* untuk meningkatkan rasa aman masyarakat. Intervensi ke Gaza dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, dengan memberlakukan pengepungan total serta menutup akses masyarakat Gaza terhadap air, listrik, makanan, dan bahan bakar¹⁶. Tindakan luar biasa tersebut dinilai lebih parah dibandingkan sebelumnya dengan melupakan keselamatan para sandera sipil Israel yang ditahan di Gaza. Israel juga menggunakan serangan darat dengan memasuki wilayah-wilayah di Gaza, yang sebelumnya hanya berupa serangan udara menggunakan rudal atau roket.

Kebijakan Sekuritisasi Pemerintah Israel dalam Mengkonstruksi Isu Ancaman Terorisme Hamas Pasca *Taufan Al Aqsa*

Dalam teori sekuritisasi Buzan, Wæver dan de Wilde di buku "*Security A New Framework for Analysis*", terdapat komponen penting dalam proses sekuritisasi, yaitu *securitizing actors*, *existential threats*, *referent objects*, dan *speech act*. Pada kasus kebijakan sekuritisasi pemerintah Israel pasca *Taufan Al Aqsa*, Pemerintah Israel sebagai aktor sekuritisasi (*securitizing actor*) menyampaikan narasi isu keamanan kepada audiens (*speech act*).

¹⁵ Al Jazeera, 'Investigating War Crimes in Gaza | Al Jazeera Investigations', 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=kPE6vbKix6A>.

¹⁶ Ibid.

Pemerintah Israel mencakup seluruh individu maupun departemen yang ada di dalam pemerintahannya, walaupun secara teknis, narasi sekuritisasi hanya disampaikan oleh beberapa bagian atau individu, mereka tetap merepresentasikan Pemerintah Israel. Di antara tokoh yang merepresentasikan Pemerintah Israel dalam mengkonstruksi isu terorisme Hamas adalah Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Eli Cohen, dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Galant. Isaac Herzog sebagai Presiden Israel merupakan figur simbolik yang memiliki peran penting dalam kebijakan sekuritisasi.

“These are not freedom fighters. These are terrorists, the worst enemies of humanity that one can imagine. I call upon the International Community unequivocally make clear and loud condemnation of Hamas, just as you condemned ISIS”¹⁷

Herzog juga memiliki peran penting dalam memutuskan kebijakan intervensi darat sebagai langkah militer Israel untuk menumpas Hamas di jalur Gaza atau wilayah Palestina lainnya.

Selain itu, Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel juga mengambil bagian sebagai aktor sekuritisasi setelah presiden. Netanyahu melalui pidatonya menarasikan Hamas sebagai kelompok teroris yang mengancam keamanan masyarakat Israel serta stabilitas kawasan. Isu terorisme juga digunakan Netanyahu untuk mendapatkan legitimasi internasional untuk membalas serangan 7 Oktober 2023 serta menjustifikasi intervensi darat di Gaza. Sebagai perdana menteri, Netanyahu berperan penting terhadap langkah-langkah militer yang diambil pada intervensi Israel dalam rangka menumpas Hamas di Gaza.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen memainkan peran utama dalam menarasikan ancaman Hamas dalam forum internasional. Sebagai Menteri luar negeri, Cohen memanfaatkan jalur diplomatik untuk menggalang dukungan komunitas internasional bagi langkah militer Israel dalam rangka melindungi warga sipil dan memerangi terorisme. Media internasional dan pernyataan publik digunakan untuk membangun narasi

¹⁷ Sky News, ‘Israel-Hamas War: Israeli President Isaac Herzog Says Country Will Do Whatever It Takes’, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=71PHAL2a7LA>.

bahwa Hamas tidak hanya mengancam masyarakat Israel, tetapi juga stabilitas keamanan kawasan.

Lebih dari itu, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galant juga menggunakan retorika untuk mengkonstruksi isu terorisme Hamas sebagai ancaman eksistensial, serta untuk mengimplementasikan operasi militer di Gaza, yang meliputi serangan darat, udara, serta blokade akses bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina.

“...Hamas conducted a brutal attack. They murdered, raped, and kidnapped children, women soldiers, and holocaust survivors on October 7th... In our war against Hamas, the Hamas terrorist organization is a war, not a war against the people of Gaza...”¹⁸

Isu terorisme pada serangan 7 Oktober 2023 dianggap sebagai ancaman nyata (*existential threat*). Alasan utama serangan tersebut dianggap sebagai serangan terorisme adalah adanya 1.200 korban jiwa dari masyarakat sipil, dan 250 orang lainnya ditahan sebagai sandera¹⁹. Selain itu, serangan ini juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur sipil serta trauma psikologis bagi masyarakat Israel di daerah zona pertempuran.

Pada kebijakan sekuritisasi ini, masyarakat Israel diidentifikasi sebagai *referent object* yang dianggap terancam oleh aksi terorisme pada serangan 7 Oktober 2023, menurut konstruksi aktor yaitu Pemerintah Israel. Pemerintah Israel mengklaim bahwa serangan 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Hamas ditujukan kepada masyarakat sipil, dibuktikan dengan jatuhnya korban jiwa serta sandera sipil yang dibawa Hamas ke Gaza. Dalam hal ini, Pemerintah Israel mengumumkan klaim yang sah terhadap perlindungan kepada masyarakat Israel yang dianggap sebagai korban atas serangan terorisme Hamas. Masyarakat Israel sebagai objek yang dilindungi oleh Pemerintah Israel karena dianggap terancam secara langsung oleh aksi terorisme Hamas.

Speech act merupakan komponen penting dalam proses sekuritisasi yang berisi pernyataan atau tindakan aktor dalam rangka mengkonstruksi

¹⁸ U.S. Department of Defense, ‘Austin, Israeli Defense Minister Hold Press Briefing’, 2025, <https://www.dvidshub.net/video/908304/austin-israeli-defense-minister-hold-press-briefing>.

¹⁹ *Ibid.*

keamanan. Pemerintah Israel menggunakan *speech act* untuk mengkonstruksi isu terorisme Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023 sebagai ancaman yang nyata. Narasi keamanan yang disampaikan oleh Pemerintah Israel melalui pernyataannya ditujukan kepada tiga audiens utama, yaitu masyarakat Israel, komunitas internasional, dan pendukung atau donatur. Kepada masyarakat Israel, Pemerintah Israel menggunakan narasi untuk mempertahankan diri dan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya dari ancaman terorisme Hamas, yang digunakan untuk menghimpun dukungan terhadap intervensi militer ke Gaza. Selanjutnya, Pemerintah Israel menyampaikan narasi kepada komunitas internasional tentang upaya Israel membela diri dan melawan ancaman terorisme. Kepada pendukung atau donaturnya, yaitu Amerika Serikat, Israel menggunakan narasi isu terorisme Hamas untuk meminta dukungan secara diplomatik dan materiil untuk kesuksesan intervensi militer ke Palestina. Dukungan diplomatik diberikan melalui veto terhadap resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sedangkan dukungan materiil diberikan melalui penyediaan peralatan perang seperti jet tempur, amunisi, rudal dan kendaraan lapis baja, serta pasokan dana lainnya.

Intervensi militer sebagai *extraordinary measures* yang menjustifikasi Israel untuk melakukan intervensi militer dalam menumpas Hamas dilakukan secara besar-besaran di Gaza. Intervensi ini dilakukan untuk menumpas seluruh instalasi militer Hamas yang diyakini berada di Gaza. Israel juga melakukan pemblokiran akses bantuan kemanusiaan dan penghancuran jalan, rumah penduduk, sekolah, rumah sakit, hingga tempat ibadah. Akses masyarakat terhadap aspek vital seperti air, listrik, dan bahan bakar juga diblokir oleh Israel. Pemblokiran juga dilakukan terhadap bantuan eksternal seperti makanan atau obat-obatan agar tidak memasuki wilayah Gaza. Hal ini mengakibatkan masyarakat Gaza berbondong-bondong mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tindakan tersebut melanggar Hukum Humaniter Internasional, sehingga merugikan masyarakat serta merusak infrastruktur sipil atas dasar konstruksi isu terorisme Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023.

Kesimpulan

Pasca Serangan 7 Oktober 2023, atau Operasi *Taufan Al Aqsa* yang dilakukan oleh kelompok Hamas, Pemerintah Israel menggunakan *speech act* untuk membangun narasi isu terorisme. Israel telah menerapkan kebijakan sekuritisasi sejak awal berdirinya Hamas, yang telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan. Setelah Intifada Kedua, Hamas telah diidentifikasi sebagai kelompok teroris, dan mencapai puncaknya pasca *Taufan Al Aqsa*. Kebijakan sekuritisasi yang dilakukan Pemerintah Israel dilakukan melalui *speech act*, untuk menjustifikasi intervensi Gaza sebagai *emergency action* dalam rangka menumpas Hamas. *Securitizing actor* dalam kebijakan sekuritisasi ini adalah Pemerintah Israel yang diwakili oleh pejabat pemerintahannya, yang merepresentasikan pemerintah Israel secara keseluruhan. *Referent object* dalam kebijakan ini adalah masyarakat Israel, yang dianggap terancam keamanannya oleh isu terorisme Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023 sebagai *existential threat*. Pemerintah Israel menggunakan *speech act* dalam mengkonstruksi narasi ancaman terorisme Hamas kepada tiga audiens utama yaitu masyarakat Israel, komunitas internasional, dan pendukung atau donatur, terutama Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera, 'Investigating War Crimes in Gaza', 2024.
<https://www.youtube.com/watch?v=kPE6vbKix6A>.
- Amnesty International, 'Israel: Palestinian armed groups must be held accountable for deliberate civilian killings, abductions and indiscriminate attacks', 2023.
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/israel-palestinian-armed-groups-must-be-held-accountable-for-deliberate-civilian-killings-abductions-and-indiscriminate-attacks>.
- Baconi, Tareq, 'Hamas Contained: The Rise and Pacification of Palestinian Resistance', *Stanford Studies in Middle Eastern and Islamic Societies and Cultures*. Redwood City: *Stanford University Press*, (2018).

- Britannica, 'Israel-Hamas War – Explanation, Summary, Casualties, & Map', 2024. <https://www.britannica.com/event/Israel-Hamas-War>.
- Buzan, Barry, Ole Wæver & Jaap de Wilde. 'Security a New Framework Analysis'. *Lynne Rienner Publisher*, (1998).
<https://library.lol/main/91A33C7D1B88D6199BA8E63AFBC19860>.
- Chughtai, Mohammed Haddad, Alia. 'A brief history of Israel-Palestine conflict in 10 maps', *Al Jazeera*, 2023.
<https://www.aljazeera.com/news/2023/11/27/palestine-and-israel-brief-history-maps-and-charts>.
- DW. 'Kronologi Konflik antara Hamas dan Israel', 2023.
<https://www.dw.com/id/sejarah-konflik-hamas-dan-israel/a-67079531>.
- Face the Nation. 'Throwback Thursday: Netanyahu Discusses the Peace Process in 1988', 2015.
<https://www.youtube.com/watch?v=v0K3jtCW5fY>.
- Hroub, Khaled. 'Hamas: A Beginner's Guide'. London: *Pluto Press*, (2006).
- Li, Michael Xiang. 'Defining the Other – Israeli Securitization of the Palestinian Population in the West Bank and Gaza since 2009', 2018. <http://hdl.handle.net/10393/38133>.
- Sky News. 'Israel-Hamas War: Israeli President Isaac Herzog Says Country Will Do Whatever It Takes', 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=7lPHAL2a7LA>.
- Sugiyono. 'Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D'. Bandung: Alfabeta, (2015).
- U.S. Department of Defense. 'Austin, Israeli Defense Minister Hold Press Briefing', 2025. <https://www.dvidshub.net/video/908304/austin-israeli-defense-minister-hold-press-briefing>.